

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PENGANGKUTAN  
BARANG PADA PT. KAI DI SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ARIF WISNU PAMUNGKAS

C 100120058

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PENGANGKUTAN  
BARANG PADA PT. KAI DI SURAKARTA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

ARIF WISNU PAMUNGKAS

C 100120058

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



Inayah, S.H./M.H.

## HALAMAN PENGESAHAN

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT. KAI DI SURAKARTA

Oleh:

ARIF WISNU PAMUNGKAS

C 100120058

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 5 November 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

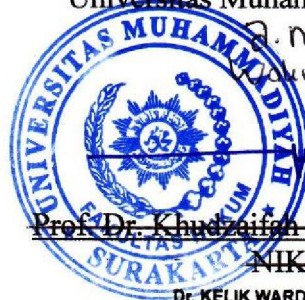
1. Inayah, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )

(  )

(  )

Dekan,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



~~Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati S.H., M.Hum.~~

~~NIK. 537~~

Dr. KELIK WARDIONO, S.H., M.H.  
NIP. 19681226 199303 1 002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

**Surakarta, 17 Oktober 2018**

Penulis



**ARIF WISNU PAMUNGKAS**

**C 100120058**

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT. KAI DI SURAKARTA**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab PT. KAI atas kehilangan dan kerusakan pengiriman barang milik pengguna jasa pengangkutan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa pengangkutan barang jika terjadi kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang pada PT. KAI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan undang-undang. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Teknis analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) apabila terjadi keterlambatan, kehilangan atau kerusakan sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat pengiriman PT. Kalog Pasal 8 memberikan ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos pengiriman barang dari nilai barang yang dipertanggungkan. Sedangkan menurut ayat (1) Pasal 158 dan ayat (3) Pasal 145 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia itu adalah untuk mengangkut barang muatan dengan selamat sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu dan membayar ganti kerugian apabila terjadi penuntutan kerugian oleh pengirim atau penerima barang atas semua peristiwa yang timbul dalam pelaksanaan pengangkutan dengan kereta api, yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pengangkut. (2) Upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang jika terjadi keterlambatan, kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah melalui non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Perjanjian, Pengangkutan Barang, Kereta Api.

### **Abstract**

The purpose of this study was to know the responsibility of PT. KAI for the loss and damage to the shipment of goods belonging to the freight service user in terms of Law Number 23 of 2007 concerning Railways and legal remedies carried out by freight service users in the event of loss and damage in the delivery of goods to PT. KAI. This research is a library law research with a law approach. Data collection method through documentation. Data analysis techniques were carried out qualitatively qualitatively. The results of the study show that: (1) The responsibilities form of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) in the event of delay, loss or damage in accordance with the regulations and shipping conditions of PT. Kalog Article 8 provides compensation of 10 (ten) times the cost of shipping

goods from the value of the good insured. While according to paragraph (1) Article 158 and paragraph (3) Article 145 of Law Number 23 Year 2007, the responsibility PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is to transport cargo safely to the destination in a timely manner and pay compensation in the event of a prosecution of loss by the sender or consignee of all events arising in the carriage of the train, due to negligence or fault of the carrier. (2) The law efforts is imposed by passengers if there is a delay, loss and damage in the delivery of goods in PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is through non-litigation, namely the settlement of disputes outside the court, consumer dispute resolution through non-litigation channels is used to overcome court proceedings, dispute resolution through non-litigation channels can be pursued through The Indonesian Consumer Institution Foundation (YLKI) and The Directorate of Consumer Protection, Disperindag and the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK).

**Keywords:** Juridical Review, Agreement, Transportation of Goods, Railways.

## 1. PENDAHULUAN

Pengangkutan merupakan bidang yang vital dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya pengangkutan berbagai kesulitan yang ditemui manusia dapat diselesaikan. Pentingnya pengangkutan dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan hukum pengangkutan dalam hal ini adalah hukum pengangkutan niaga.<sup>1</sup>

Peristiwa penyelenggaraan pengangkutan barang terjadi karena adanya perjanjian. Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut dilakukan atas “persetujuan” bersama antara pengangkut dan pengirim. Perjanjian pengangkutan niaga adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan tetapi didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 48

<sup>2</sup> Muhammad Abdulkadir, *Op. Cit*

Bagi pihak perusahaan jasa pengangkutan dan perusahaan kereta api terjadi perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa, suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain suatu kenikmatan diri suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir disanggupi pembyarannya (Pasal 1548 KUH Perdata). Dijelaskan dalam Pasal 155 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dijelaskan bahwa tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Adanya perjanjian menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban. Kewajiban pokok perusahaan pengangkut penumpang atau barang adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan, sebagai imbalan haknya perusahaan angkutan memperoleh biaya angkutan dari penumpang atau pengirim barang. Lebih jelasnya, khususnya dalam pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut memiliki kewajiban lainnya. Kewajiban tersebut diantaranya merawat, menjaga, dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya, dan menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau terlambat.<sup>3</sup>

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan mengarahkan peneliti sesuai tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah tanggungjawab PT. KAI atas kehilangan dan kerusakan pengirim barang milik pengguna jasa pengangkutan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian?, dan 2) Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa pengangkutan barang jika terjadi kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang pada PT. KAI?

---

<sup>3</sup> Hadi Setia Tunggal, 2007, *Undang-Undang Perkeretaapian (UU No, 23 Tahun 2007)*, Jakarta: Harvarindo, hal 59.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab PT. KAI atas kehilangan dan kerusakan pengiriman barang milik pengguna jasa pengangkutan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa pengangkutan barang jika terjadi kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang pada PT. KAI.

## **2. METODE**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti bahan pustaka (*library research*) atau dengan kata lain penelitian hukum kepustakaan<sup>4</sup> dengan pendekatan undang-undang. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Tanggungjawab PT. KAI Atas Kehilangan dan Kerusakan Pengirim Barang Milik Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian**

Pada perjanjian baku antara konsumen PT Kalog dengan konsumen terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh konsumen. Perjanjian PT Kalog menjelaskan dalam pengaturan pengiriman barang dengan media transportasi kereta api. Berikut pengaturan PT Kalog yang harus dipenuhi oleh konsumen.

- a. Pengirim harus menyatakan isi kiriman dengan sebenarnya. Barang dokumen/ hewan/ tanaman dan lain-lain disebut barang/ dokumen) yang isinya tidak

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet V, Jakarta: Rajawali Pers, hal 13.



sesuai dengan keterangan oleh Pengirim merupakan suatu pelanggaran yang dapat diproses secara hukum yang berlaku.

- b. Kalog melakukan pemeriksaan (uji petik) terhadap kiriman yang dicurigai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kalog secara khusus dan atau yang berlaku di Indonesia secara umum
- c. Kalog hanya bertanggung jawab atas barang/ dokumen yang dikirim apabila Pengirim telah melunasi semua biaya pengiriman dan memiliki bukti tanda terima (asli) dari Kalog.
- d. Barang dokumen yang dilarang untuk dikirim adalah a) Surat, warkatpos, dan kartupos, b) Uang tunai (rupiah/ mata uang asing), surat berharga, perhiasan dan yang sejenis lainnya, c) Barang/ dokumen berbahaya dan mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan percikan api, dan dapat merusak barang lainnya (air aki atau barang kimia), d) Barang/ dokumen yang mengandung psikotropika dan narkotika, e) Barang/ dokumen yang dilarang menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, f) Barang dokumen cetakan foto, dan barang lainnya yang dapat melanggar aturan kesusilaan/ pornografi.
- e. Kalog tidak bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut: a) Semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan yang menyebabkan barang/ dokumen yang dikirim tidak berfungsi, mati atau berubah fungsi, baik yang menyangkut kendaraan bermotor, mesin atau barang sejenis maupun barang-barang elektronik seperti: tv, kulkas, computer dan lain-lain; b) Keterlambatan pengiriman barang/ dokumen ke kota tujuan yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*); c) Semua penahanan/ penyitaan/ pemusnahan barang/dokumen (isi kiriman oleh instansi pemerintah (Bea Cukai, Kepolisian dan lain-lain); d) Tuntutan/klaim/keluhan setelah dilakukan serah terima barang/ dokumer oleh Penerima pada BTT atau 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengiriman; e) Kerusakan atau kehilangan barang/dokumen karena bencana alam, huru hara, perampokan, dan pembajakan (*force majeure*); f) Kebocoran, kerusakan, busuk atau mati untuk jenis barang cair, barang pecah-belah, buah-buahan, binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan; g) Kerusakan atau

- kehilangan barang/dokumen karena pembungkusan (*packing*) yang tidak sempurna; h) Penggantian barang/dokumen yang tidak dinyatakan isi kirimannya.
- f. Kalog dapat menentukan sarana angkutan tercepat untuk mengirimkan barang/dokumen ke tempat tujuan, yang tidak selalu sama dengan informasi sebelumnya, terutama dalam keadaan terpaksa atau terdapat gangguan transportasi yang dapat mengganggu pengiriman ke tempat tujuan.
  - g. Bilamana tidak ada keluhan atau klaim dari penerima barang/dokumen Kalog pada saat barang/dokumen diterima, maka barang/dokumen tersebut dianggap telah diterima dengan baik dan benar.
  - h. Bilamana terjadi kehilangan atau kekurangan atas barang/dokumen yang dikirim, yang disebabkan karena kelalaian Kalog, karyawan, cabang, perwakilan dan agen, maka Kalog akan melakukan penggantian maksimum 10X dari biaya pengiriman barang/dokumen yang hilang saja atau setinggi-tingginya Rp. 1.000 000,- (satu juta rupiah)
  - i. Untuk barang/dokumen berharga atau berisiko tinggi atau mudah pecah/ rusak agar dapat diasuransikan oleh Pengirim sesuai nilai sebenarnya.
  - j. Semua klaim hanya dapat diselesaikan di kantor Kalog dengan melampirkan:
    - a) Berita Acara Keluhan/Kerusakan/Kehilangan barang/dokumen yang ditandatangani oleh penerima dan petugas Kalog di tempat tujuan; b) Bukti Tanda Terima (*Consignment Note*) asli.
  - k. Bagi Pengirim yang mendapat fasilitas piutang atau membayar dibelakang, jumlah klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan/invoice dari Kalog
  - l. Khusus pengiriman hewan: a) Pengiriman hewan wajib menggunakan standar *pet cargo/pet carrier/ kennel box* sesuai dengan jenis hewan yang dikirim; b) Segala akibat yang terjadi atas hewan yang dikirim (antara lain cacat, mati, dan lain sebagainya) menjadi tanggung jawab Pengirim sepenuhnya
  - m. Barang/dokumen yang tidak diambil oleh Penerima dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak barang/dokumen sampai di stasiun tujuan, apabila hilang/rusak/menurun kualitasnya sama sekali tidak menjadi tanggung jawab

Kalog. Kalog akan mengenakan biaya/tarif (denda) kepada Penerima sebesar 25% (dua puluh lima persen)/hari dari biaya/tarif Pengiriman barang/dokumen terhitung dari batas waktu maksimal pengambilan, selama barang/dokumen tidak diambil dan berada di tangan Kalog (di Stasiun tujuan)

- n. Barang/dokumen yang tidak di ambil oleh Pengirim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak barang/dokumen sampai di stasiun tujuan, Kalog berhak untuk melakukan segala tindakan yang di anggap baik oleh Kalog terhadap barang/dokumen yang bersangkutan, tanpa pemberitahuan ataupun persetujuan Pengirim.
- o. Pelayanan pengantaran/*dooring* hanya dilakukan 1 (satu) kali ke alamat tujuan dan jika penerima berhalangan menerima saat proses pengantaran, maka biaya yang timbul dikarenakan pengantaran ulang dibebankan ke Penerima, minimal 50% (lima puluh persen) dari biaya kirim dengan maksimal pengantaran 2 (dua) kali.

Masalah risiko selalu berkaitan dengan tanggung jawab, karena jika risiko itu terjadi, maka timbullah suatu tanggung jawab atas suatu peristiwa yang tidak diharapkan itu. Dalam bidang pengangkutan dengan kereta api, khususnya pengangkutan barang dengan kereta api, PT Kereta Api Indonesia sebagai pihak pengangkut harus bertanggung jawab terhadap keselamatan barang-barang yang diangkutnya.<sup>5</sup> Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 158 ayat (2)<sup>6</sup> tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia dimulai pada saat barang-barang telah diterima untuk diangkut sampai diserahkan kembali kepada pihak penerima atau bisa juga pihak ketiga maupun pihak pengirim itu sendiri, tentu saja dalam hal penyerahan ini harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan, dan keadaan barang-barang dalam keadaan utuh dan lengkap, dengan kata lain tidak kurang dan tidak rusak. Ayat (2) Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 sesuai dengan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang juga

---

<sup>5</sup> Bapak Agus Rindani Sani, salah seorang pegawai PT KAI Stasiun Balapan, di Surakarta, *Hasil Wawancara*, pada hari Jum'at, 27 Juli 2018, jam 10.00 WIB, di Stasiun Balapan Surakarta.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

menjelaskan bahwa mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai barang diterima sampai diserahkannya barang tersebut.<sup>7</sup>

Dengan melihat berbagai tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia di atas, membuat PT Kereta Api Indonesia harus benar-benar melaksanakan amanah yang telah dijanjikannya, karena jika tidak sesuai dengan kesepakatan akan membuat konsumen mengalami kerugian dan akan menimbulkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap PT Kereta Api Indonesia. Hukum perikatan Islam juga telah mengaturnya, produk apapun yang diluncurkan, persaingan bisnis seperti apapun yang dihadapi tetap ada beberapa etika bisnis yang harus ditaatinya yaitu: kebenaran, amanah, keikhlasan, persaudaraan, ilmu pengetahuan dan keadilan.

Seperti yang telah dituangkan dalam firman Allah Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 29 berikut ini:<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 diatur dalam ayat (1) Pasal 158 yang menyatakan bahwa badan penyelenggara yaitu PT Kereta Api Indonesia bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.<sup>9</sup> Kerugian seperti yang dimaksud di atas adalah suatu kerugian yang berasal dari pelayanan angkutan kereta api dan harus dapat dibuktikan dengan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. 1967. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Jamunu, hal 122.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 158

sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima, serta dijelaskan dalam ayat (3) Pasal 145 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 bahwa dalam hal barang yang diangkut rusak, salah kirim, atau hilang akibat kelalaian penyelenggara sarana perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkan.

Dalam pengiriman barang muatan dengan kereta api, jika terjadi risiko yang tidak diinginkan yang disebabkan karena suatu keadaan memaksa atau *overmacht* yang menyebabkan barang musnah, rusak atau terlambat PT Kereta Api Indonesia tidak bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang dialami pengguna jasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa<sup>10</sup> Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena bukan disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian; dan/atau terjadi keadaan memaksa. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 sesuai dengan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga menyatakan bahwa ganti rugi tidak perlu dipenuhi apabila kerugian tersebut disebabkan karena keadaan memaksa.

Sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 114 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007<sup>11</sup>, agar pengangkutan dengan kereta api dapat berjalan dengan lancar maka sarana kereta api yang dioperasikan diwajibkan untuk mempunyai keandalan dan memenuhi persyaratan keselamatan, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kondisi sarana kereta api ini harus siap pakai dan secara teknis layak untuk dioperasikan dengan dilakukannya perawatan. Berdasarkan ayat (1) Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 untuk memenuhi hal tersebut, maka terhadap setiap sarana kereta api dilakukan pengujian dan pemeriksaan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, merupakan usaha Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan angkutan dengan kereta api khususnya dalam pengangkutan barang, mulai dari perawatan dan pengujian terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian serta tindakan PT Kereta

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 88 Tentang Perkeretaapian.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 114 ayat (1)

Api Indonesia yang harus mengansuransikan tanggung jawabnya bertujuan untuk menekan risiko dalam pengangkutan barang dengan kereta api, sehingga masyarakat yang menggunakan jasa kereta api dapat merasa puas dengan pelayanan jasa kereta api. Hal ini sesuai dengan asas kepentingan umum yang terdapat dalam huruf d Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dimana PT Kereta Api Indonesia dalam pelayanannya harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban.

### **3.2 Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Jika Terjadi Kehilangan dan Kerusakan dalam Pengiriman Barang pada PT. KAI**

Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang No 8 Tahun 1999, tentang perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan keselamatan badannya, keamanan jiwanya, atau harta bendanya dalam pemanfaatan jasa pengiriman dapat mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum ataupun melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, karena panjangnya proses penggantian kerugian jika melalui jalur BPSK, kebanyakan konsumen yang merasa dirugikan lebih memilih jalur damai dengan pihak PT Herona Express.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber Ibu Pratiwi Adi Setyorini,<sup>12</sup> terungkap bahwa banyaknya syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan gugatan hingga terpenuhinya kompensasi dari pihak PT Herona Express, membuat dia memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber Ibu Pratiwi Adi Setyorini selaku Penanggung Jawab PT Herona Express, bahwa penanganan gangguan terhadap pengiriman barang ataupun kerugian yang diderita konsumen, pihak PT Herona Express berusaha cepat dalam mencari alternatif solusi dalam pemberian kompensasi dan ganti rugi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Op.cit*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Hal ini dilakukan secara kekeluargaan. Dalam hal keterlambatan, pihak PT Herona Express sendiri masih terus mencari solusi yang tepat karena terjadinya keterlambatan tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT Herona Express. Keterlambatan biasanya dikarenakan faktor transit yang cukup lama. Dalam hal kerusakan paket pos atau surat pos, menurut Ibu Pratiwi Adi Setyorini lebih diperhatikan dari cara pengirim membungkus dan membuat paket tersebut. Paket sebaiknya harus dibungkus secara benar dan rapi terutama untuk benda-benda yang mudah pecah. Untuk hal kerusakan, jika kerusakan berasal dari buruknya cara pengirim membungkus paket, maka pihak PT Herona Express tidak bertanggungjawab dan apabila ada klaim dari penerima, maka barang dikembalikan kepada pengirim. Apabila paket rusak saat didaerah transit, maka yang bertanggungjawab adalah pihak PT Herona Express didaerah transitnya barang kiriman tersebut. Adapun dalam hal kehilangan, pihak yang bertanggungjawab tergantung letak dimana barang tersebut dalam proses pengiriman. Jika hilang didaerah transit merupakan tanggungjawab pihak PT Herona Express daerah transit, namun jika barang hilang dalam perjalanan dari daerah transit ke penerima, maka beban tanggung jawab dibebankan kepada kedua pihak yaitu pihak PT Herona Express transit dan pihak PT Herona Express penerima.<sup>14</sup>

Jika seorang konsumen yang menyewa jasa perusahaan ekspedisi/ pengiriman barang namun barang konsumen ditemukan hilang dan Perusahaan tidak mau bertanggung jawab terhadapnya. Maka jalan satu-satunya agar hak-hak konsumen kembali adalah melakukan upaya hukum terhadapnya. Namun kebanyakan konsumen tidak mengetahui bahwa hak mereka dilindungi oleh banyak Peraturan Perundang-undangan dan mereka diberikan kemudahan untuk menuntut hak-haknya tersebut.

Berikut upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang konsumen atau pemilik barang dalam hal telah terbukti bahwa barang miliknya hilang atau rusak akibat dari kelalaian atau kesalahan dari perusahaan pengiriman barang/

---

<sup>14</sup> Ibid.

perusahaan Ekspedisi<sup>15</sup>: 1) Gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, 2) Pelaporan pidana atas tindakan penggelapan, 3) Melaporkan ke dinas perhubungan terkait dengan pelanggaran kewajiban, 4) Melaporkan ke badan penyelesaian sengketa konsumen atau LSM penyelesaian sengketa konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, upaya hukum pengguna jasa, jika terjadi kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang, yaitu melalui non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), LSM dan Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pengguna jasa juga dapat mengajukan penggantian barang/ dokumen sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan dan syarat-syarat pengiriman PT. Kalog Pasal 8 Bilamana terjadi kekurangan/ kehilangan atas barang-barang/ dokumen yang dikirim yang disebabkan karena kelalaian kalog, karyawan, cabang, perwakilan dan agen, maka kalog akan melakukan penggantian maksimum 10x dari biaya pengiriman barang/ dokumen yang hilang saja atau setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akan tetapi bilamana pengirim barang menjelaskan secara rinci barang/ dokumen yang dikirim, ganti kerugian bisa lebih dari ketentuan, karena demi menjaga nama baik perusahaan pengiriman (kalog) (dengan musyawarah). Contohnya Wahyu mengirimkan barang berupa laptop seharga Rp. 10.000.000,- rusak dalam perjalanan pengangkutan, bisa diupayakan ganti rugi lebih dari ketentuan kalog Pasal 8.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibu Pratiwi Adi Setyorini, selaku Kepala Cabang Herona di Surakarta, pada hari Senin, 6 Agustus 2018, jam 10.00 WIB, di Kantor Cabang Herona Surakarta.

<sup>16</sup> Bapak Agus Rindani Sani, salah seorang pegawai PT KAI Stasiun Balapan, di Surakarta, *Hasil Wawancara*, pada hari Jum'at, 27 Juli 2018, jam 10.00 WIB, di Stasiun Balapan Surakarta.



## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) apabila terjadi keterlambatan, kehilangan atau kerusakan sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat pengiriman PT. Kalog Pasal 8 memberikan ganti rugi sebesar nilai barang yang didasarkan Harga Tanggungan Ongkos Kirim (HTOK) yaitu maksimal 10 (sepuluh) kali ongkos kirim. Sedangkan berdasarkan Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB) maksimal pemberian ganti rugi yang akan diberikan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebesar harga pertanggungan nilai barang, berdasarkan HTOK dan HTNB maksimal adalah 10 (sepuluh) kali ongkos pengiriman barang dari nilai barang yang dipertanggungkan. Menurut ayat (1) Pasal 158 dan ayat (3) Pasal 145 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia itu adalah untuk mengangkut barang muatan dengan selamat sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu dan membayar ganti kerugian apabila terjadi penuntutan kerugian oleh pengirim atau penerima barang atas semua peristiwa yang timbul dalam pelaksanaan pengangkutan dengan kereta api, yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pengangkut, sedangkan kerugian-kerugian yang timbul di luar kesalahan pengangkut atau tidak dapat dibuktikan bahwa itu kesalahan pengangkut atau di luar wilayah kekuasaanya, maka pihak PT Kereta Api Indonesia tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban mengganti kerugian yang timbul.

Upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang jika terjadi keterlambatan, kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah melalui non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

Hendaknya penyelenggara angkutan dan penjual jasa pengiriman barang tidak sekedar mencari keuntungan, namun juga memperhatikan hak-hak pengguna jasa agar barang yang dikirimkan tepat sampai tujuan dan tidak berkurang suatu apa.

Hendaknya perjanjian menyertakan hak dan kewajiban semua para pihak baik penyelenggara transportasi moda, pengguna jasa transportasi, dan pengguna jasa pengiriman barang. Hal ini perlu dilaksanakan agar semua proses pengiriman barang tidak ada pihak-pihak yang harus dirugikan.

Hendaknya masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam kegiatan pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan moda transportasi kereta api.

## PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: Pertama, kepada orang tua yang memberi semangat dan doa untuk penulis agar bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Kedua, kepada saudara-saudaraku yang menjadi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Semua teman penulis yang memberi semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Departemen Agama RI. 1967. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Jamunu

Hadi Setia Tunggal, 2007, *Undang-Undang Perkeretaapian (UU No, 23 Tahun 2007)*, Jakarta: Harvarindo.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet V, Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian